

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari tidak terbatas, terdiri dari kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Hal yang selalu menjadi faktor utama dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut untuk membeli atau membayar berbagai keperluan adalah uang. Pada masyarakat menengah ke bawah, seringkali terjadi masalah keuangan dalam mencukupi berbagai kebutuhannya. Mereka mau tidak mau harus membatasi atau mengurangi pembelian berbagai keperluan yang dianggap kurang penting.

Terjadinya pandemi Covid-19 memberikan dampak besar terhadap seluruh sektor kehidupan masyarakat, terutama sektor ekonomi. Adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akan aktivitas masyarakat mempengaruhi aktivitas bisnis yang tentunya akan berimbas pada penurunan perekonomian. Para pelaku usaha mulai melakukan efisiensi untuk menekan kerugian usahanya dengan merumahkan bahkan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawannya.

Peningkatan kebutuhan dana masyarakat pada masa pandemi membuat mereka mencari jalan keluar untuk permasalahan tersebut. Dalam keadaan seperti ini peran lembaga keuangan sangat membantu meringankan masalah perekonomian mereka. Salah satu cara untuk menanggulangi masalah tersebut adalah kredit bank. Namun realitanya, masyarakat terutama kalangan golongan ekonomi bawah, merasa mekanisme kredit yang berlaku di bank terlalu rumit.

Permasalahan terkini terkait penyaluran kredit perbankan dimuat dalam beberapa berita harian. Berdasarkan berita Pikiran-rakyat.com pada tanggal 28 April 2020, Sudjono selaku *Finance Director & Corporate Secretary BFI Finance* mengemukakan bahwa sejak terjadinya kasus COVID-19, penyaluran pembiayaan

semakin diperketat. Hal ini merupakan bentuk upaya untuk mencegah risiko bisnis yang muncul akibat pandemi ini di waktu mendatang.

Hal yang sama juga tercantum dalam berita Kompas.com tanggal 23 Juli 2020. Muhammad Ikhsan, selaku Staf Khusus Menteri BUMN Bidang Makro Ekonomi mengatakan bahwa penyaluran kredit tersendat akibat perekonomian yang menurun sejak pemberlakuan PSBB. Hal ini dikarenakan keengganan bank serta penghematan pemberian pinjaman oleh bank di tengah pandemi.

Permasalahan serupa juga dimuat dalam berita Kompas.com pada tanggal 24 September 2020. Plt Direktur Utama Bank Mandiri mengemukakan bahwa penyaluran kredit Bank Mandiri secara konsolidasi hanya tumbuh 4,38 persen *year on year* (yoy) dibandingkan periode sama tahun lalu. Kredit yang disalurkan pun berpotensi menjadi kredit macet (*non performing loan/NPL*) karena sektor riil dan masyarakat tak bisa beraktivitas normal.

Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sumut, dalam berita Suarasumut.id pada tanggal 7 Oktober 2020 mengemukakan bahwa penyaluran kredit perbankan pada Agustus 2020 tumbuh melambat dari Desember 2019. Pandemi Covid-19 membuat dunia usaha kesulitan menyusul melemahnya permintaan. Akibatnya pengusaha menunda pinjaman dan ada yang membatalkan kredit yang siap dicairkan perbankan. Bahkan, ada pengusaha yang menunggak pembayaran kreditnya.

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas, penyaluran kredit perbankan saat ini terhambat dan menurun akibat berbagai hal. Masyarakat yang ekonominya terdampak pandemi tetap berusaha mencari pinjaman kredit kepada lembaga keuangan lain untuk mencukupi kebutuhannya.

Salah satu lembaga keuangan milik pemerintah yang berkiprah untuk menyalurkan pinjaman kepada masyarakat adalah PT Pegadaian. Penyaluran kredit PT Pegadaian dilakukan atas dasar hukum gadai, yaitu calon peminjam wajib memberikan harga bergerakaknya sebagai jaminan untuk perusahaan. Jika nasabah gagal melunasi pinjaman atau tidak memperpanjang pembiayaan setelah

berakhirnya perjanjian pembiayaan, lelang akan dilakukan oleh Pegadaian untuk penjualan jaminan. Prosedur pinjaman di Pegadaian sangat sederhana, mudah dan cepat.

Besarnya penyaluran kredit gadai PT Pegadaian (Persero) dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Salah satu faktor internal yang mempengaruhi penyaluran kredit gadai PT Pegadaian (Persero) adalah pendapatan. Sedangkan salah satu faktor eksternalnya yaitu keadaan ekonomi yang harus diperhatikan perusahaan, seperti tingkat inflasi.

Selain untuk melayani kepentingan umum, PT Pegadaian (Persero) juga memiliki tujuan untuk mendapatkan laba. PT Pegadaian (Persero) selalu mengupayakan agar kualitas pelayanan yang diberikan baik, dengan tujuan menambah pendapatan, karena pendapatan merupakan salah satu sumber dana pegadaian dalam menyalurkan kreditnya. Semakin besar pendapatan yang diterima, maka semakin besar juga kredit yang disalurkan kepada nasabahnya.

Selama tahun 2020, PT Pegadaian (Persero) selalu menampakkan performa yang baik dibuktikan dengan peningkatan pendapatan usaha sebesar 24,27% dari Rp 17,67 triliun di tahun 2019 menjadi Rp 21,96 triliun.

Perihal lainnya yang kerap menjadi atensi pemerintah adalah tingkat inflasi. Harapan pemerintah adalah mempertahankan agar tingkat inflasi tetap rendah, namun tingkat inflasi sebesar nol persen bukanlah tujuan pokok kebijakan pemerintah sebab hal itu sukar dicapai.

Pandemi sempat membuat perekonomian sekarat yang berimbas pada terjadinya inflasi rendah. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi bulan Januari 2021 sebesar 1,55% *year on year (yoy)*. Inflasi turun menjadi 1,38% *year on year (yoy)* di bulan Februari 2021. Di sepanjang tahun 2020 inflasi Indonesia berada di angka 1,68% *year on year (yoy)*. Tingkat inflasi di Indonesia berada di bawah sasaran target Bank Indonesia (BI) sebesar 3% plus minus 1 poin persentase.

Selama masa pandemi Covid 19, PT Pegadaian (Persero) telah memberikan relaksasi pinjaman kepada nasabah yang terdampak pandemi ini. Berdasarkan

statistik Perusahaan Pegadaian Otoritas Jasa Keuangan (OJK), besarnya pinjaman yang disalurkan Pegadaian justru tercatat naik 13,22 persen *year on year (yoy)* dari Rp50,76 triliun pada 2019 menjadi Rp57,47 triliun pada 2020.

Sampai saat ini, PT Pegadaian (Persero) telah melahirkan produk yang beraneka ragam, baik yang berlandaskan konvensional maupun syariah. Gadai merupakan kegiatan yang sejauh ini masih menjadi otoritas PT Pegadaian, meskipun banyak bank syariah yang belakangan ini ikut serta dalam penerbitan produk gadai emas syariah. Salah satu produk yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) adalah Kredit Cepat Aman (KCA) yaitu pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang mudah, aman, dan cepat. Melalui upaya ini, pemerintah telah melindungi rakyat kecil yang tidak memiliki akses ke layanan perbankan (Soemitra, 2015:395).

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, untuk itu penulis berkehendak untuk melakukan penelitian skripsi dengan mengambil judul “Pengaruh Pendapatan Pegadaian dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit Cepat Aman pada PT Pegadaian (Persero) Tahun 2012-2020”.

Alasan peneliti memilih periode 2012-2020 karena tahun 2012 merupakan salah satu momentum sejarah bagi Pegadaian dimana tepat tanggal 1 April 2012, di ulang tahun yang ke 111 tahun, Pegadaian telah sah berganti badan hukum yang semula adalah Perusahaan Umum (Perum) menjadi Persero Terbatas (PT). Pergantian menjadi persero ini bertujuan untuk menumbuhkan tingkat efisien dan efektif perusahaan dalam menyelenggarakan penyaluran pinjaman kepada nasabah serta dapat memanfaatkan sumber daya perseroan secara maksimal beserta penerapan asas perseroan terbatas.

Alasan peneliti memilih produk Kredit Cepat Aman (KCA) di PT Pegadaian (Persero) dalam penelitian ini dikarenakan Kredit Cepat Aman (KCA) merupakan produk paling unggul yang disediakan kepada nasabah. Disamping itu produk Kredit Cepat Aman (KCA) adalah produk pinjaman dengan metode yang mudah dan cepat dibanding produk pinjaman lainnya.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, perumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Apakah terdapat pengaruh pendapatan terhadap penyaluran Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT Pegadaian (Persero) tahun 2012-2020?
- 2) Apakah terdapat pengaruh tingkat inflasi terhadap penyaluran Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT Pegadaian (Persero) tahun 2012-2020?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pendapatan terhadap penyaluran Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT Pegadaian (Persero) tahun 2012-2020.
- 2) Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh tingkat inflasi terhadap penyaluran Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT Pegadaian (Persero) tahun 2012-2020.

1.4. Manfaat Penelitian

Terungkapnya pengaruh pendapatan dan tingkat inflasi terhadap penyaluran kredit PT Pegadaian (Persero) ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

- 1) Pengembangan Ilmu Pengetahuan
Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memperluas ladang keilmuan mengenai penyaluran kredit khususnya pada lembaga keuangan non bank seperti PT. Pegadaian (Persero).
Bagi peneliti selanjutnya, yaitu sebagai bahan rujukan dan referensi apabila ingin mengkaji lebih mendalam mengenai permasalahan yang relevan dengan penelitian ini.
- 2) Regulator (Pembuat Kebijakan)

Bagi Pemerintah Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dalam rangka menyusun kebijakan regulator.

Bagi Bank Indonesia, sebagai bahan untuk bersinergi dalam upaya mendukung pengembangan bisnis Pegadaian di Indonesia.

Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan peninjauan kebijakan perusahaan sehingga dapat mendorong perkembangan bisnis Pegadaian di Indonesia.

3) Investor (Pemilik Modal)

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai informasi untuk para penanam modal sehubungan dengan keputusannya untuk menginvestasikan modalnya terhadap perusahaan.